

Nama: Sela Ayu Irawati

Npm: 2313031015

Matkul: Ekonomi Pendidikan

1. Analisis Struktur Pengeluaran

- Apakah struktur belanja pendidikan di Nusantara Raya sudah efisien?
- Bagian mana yang perlu direalokasi? Mengapa?

Jawab:

- Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah mencapai sekitar 20%–22% dari APBD, efisiensinya masih dipertanyakan. Hal ini terlihat dari komposisi belanja yang didominasi oleh gaji dan tunjangan sekitar $\pm 65\%$ – 70% , sementara belanja yang langsung berdampak pada kualitas pembelajaran masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan adanya allocative inefficiency, di mana anggaran besar belum menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan.
- Bagian yang perlu direalokasi

Komponen	Porsi Saat Ini	Rekomendasi	Alasan Singkat
Gaji & Tunjangan	65%–70%	55%–60%	Terlalu dominan, perlu efisiensi dan pemerataan
Infrastruktur	$\pm 12\%$	18%–20%	Mendukung fasilitas dan digitalisasi pembelajaran
Bantuan Siswa	$\pm 8\%$	12%–15%	Mengurangi kesenjangan akses pendidikan
Administrasi	$\pm 12\%$	6%–8%	Banyak potensi inefisiensi, bisa ditekan

Karena Perubahan komposisi anggaran ini penting karena selama ini sebagian besar dana masih digunakan untuk belanja rutin yang tidak langsung berdampak pada proses belajar siswa. Sementara itu, aspek yang berhubungan langsung dengan kualitas pembelajaran, seperti kemampuan guru dan fasilitas belajar, justru masih kurang mendapat perhatian. Dengan meningkatkan alokasi pada kualitas, seperti pelatihan guru, teknologi, dan bantuan siswa, diharapkan hasil belajar bisa meningkat lebih nyata. Selain itu, bantuan siswa juga penting untuk mengurangi kesenjangan agar semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama.

2. Analisis Sumber Pembiayaan

- Apakah pembiayaan masih terlalu bergantung pada pemerintah daerah?
- Perlukah melibatkan sektor swasta atau skema pembiayaan alternatif? Jelaskan model yang tepat.

Jawab:

- Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih cenderung bergantung pada pemerintah daerah melalui APBD. Kondisi ini membuat sistem pembiayaan kurang fleksibel dan cukup rentan ketika kemampuan keuangan daerah menurun. Selain itu, ketergantungan ini juga dapat menimbulkan ketimpangan antar wilayah, karena tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang sama. Akibatnya, kualitas pendidikan antar daerah bisa menjadi tidak merata.
- Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pelibatan sektor swasta dan pengembangan skema pembiayaan alternatif. Salah satu model yang dapat diterapkan adalah kerja sama pemerintah dan swasta (PPP), terutama dalam penyediaan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Selain itu, pemanfaatan dana CSR perusahaan juga dapat membantu mendukung pembiayaan bagi siswa kurang mampu. Pemerintah juga dapat mengembangkan dana abadi pendidikan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan menjadi lebih beragam, stabil, dan berkelanjutan.

3. Perbandingan dengan Negara OECD

- Elemen apa dari praktik negara OECD yang realistis diadopsi?
- Apa tantangan implementasinya di konteks Indonesia?

Jawab:

- Beberapa praktik dari negara OECD yang realistis untuk diadopsi adalah penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu alokasi dana yang didasarkan pada hasil atau capaian pendidikan, bukan hanya kebutuhan administratif. Selain itu, pembiayaan berbasis kebutuhan siswa juga penting, di mana sekolah dengan kondisi lebih sulit atau siswa kurang mampu mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Pemanfaatan teknologi dalam sistem evaluasi dan pembelajaran juga menjadi elemen yang relevan, karena dapat membantu memantau perkembangan belajar siswa secara lebih efektif dan efisien.
- Meskipun praktik tersebut cukup relevan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan

infrastruktur, terutama di daerah terpencil yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam pengelolaan dan perencanaan anggaran, masih belum merata. Sistem birokrasi yang cenderung kaku juga menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan yang berbasis kinerja dan fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sistem dan peningkatan kapasitas agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara optimal.

4. Rancangan Reformasi

Susun proposal singkat reformasi pembiayaan pendidikan selama 5 tahun yang mencakup:

- Perubahan struktur belanja
- Strategi peningkatan kualitas guru
- Digitalisasi sekolah
- Mekanisme monitoring dan evaluasi

Jawab:

Kerangka Strategis'' NUSANTARA CERDAS''

Visi: Pembiayaan pendidikan yang efisien, adil, dan berkualitas.

Misi: Efisiensi anggaran, pemerataan akses, keberlanjutan pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi.

Tahapan:

Tahun 1–2: Evaluasi dan penataan anggaran

Tahun 3–4: Implementasi dan realokasi

a. Perubahan Struktur Belanja

Pada tahap awal (tahun 1–2), dilakukan evaluasi dan penataan ulang anggaran untuk mengurangi belanja yang kurang efektif, terutama pada sektor administrasi. Selanjutnya (tahun 3–5), anggaran secara bertahap dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.

Target komposisi anggaran:

Komponen	Awal	Target 5 Tahun
Gaji & Tunjangan	±68%	55%–60%

Infrastruktur	±12%	18%–20%
Bantuan Siswa	±8%	12%–15%
Administrasi	±12%	6%–8%

b. Strategi Peningkatan Kualitas Guru

Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran, misalnya minimal 1–2 kali dalam setahun. Selain itu, perlu diterapkan sistem insentif berbasis kinerja, seperti pemberian tunjangan tambahan bagi guru yang menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa. Pemerataan distribusi guru juga menjadi prioritas, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar, dengan memberikan insentif khusus bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil.

c. Digitalisasi sekolah

Tahun 1:

Dilakukan pemetaan kondisi infrastruktur digital di seluruh sekolah untuk mengetahui tingkat kesiapan, seperti ketersediaan internet, perangkat, dan listrik.

Tahun 2:

Fokus pada sekolah yang masih minim akses (daerah terpencil), dengan penyediaan jaringan internet dan perangkat dasar seperti komputer atau tablet.

Tahun 3:

Pengembangan dan penggunaan platform pembelajaran digital, serta pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi untuk proses belajar mengajar.

Tahun 4:

Integrasi sistem pembelajaran digital dengan data pendidikan, seperti penggunaan sistem manajemen pembelajaran (LMS) untuk memantau perkembangan siswa.

Tahun 5:

Evaluasi dan penyempurnaan sistem digitalisasi, serta pemerataan akses agar seluruh sekolah dapat menggunakan teknologi secara optimal.

d. Mekanisme monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran pendidikan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran. Sistem ini perlu dirancang secara bertahap dan berbasis data.

1. Sistem Monitoring Berlapis

Pengawasan dilakukan dalam beberapa tingkat, yaitu tingkat sekolah (oleh kepala sekolah dan pengawas), tingkat daerah (oleh dinas pendidikan), dan tingkat provinsi. Monitoring dilakukan secara berkala, misalnya bulanan untuk sekolah dan tahunan untuk evaluasi kebijakan.

2. Penggunaan Data dan Indikator Kinerja

Evaluasi tidak hanya melihat penggunaan anggaran, tetapi juga hasil yang dicapai. Indikator yang digunakan antara lain peningkatan hasil belajar siswa, tingkat partisipasi sekolah, serta pemerataan kualitas pendidikan antar wilayah.

3. Sistem Digital dan Transparansi

Penggunaan sistem digital seperti dashboard pendidikan diperlukan untuk memantau data secara real-time. Selain itu, laporan anggaran dan hasil program perlu dipublikasikan secara terbuka agar dapat diawasi oleh masyarakat.

4. Evaluasi Berkala dan Perbaikan Kebijakan

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan di tahun berikutnya. Dengan begitu, program yang kurang efektif dapat segera diperbaiki atau disesuaikan.